

EFEKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN MAJENE

Nurul Dian Utami

NPP. 29.1955

Asdaf Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : tamita913@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced by the community regarding the Effectiveness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Earthquake Disaster Mitigation in Majene Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the Regional Disaster Management Agency Effectiveness in Earthquake Disaster Mitigation in Majene Regency and to find out what obstacles and efforts were made by the Majene Regency Regional Disaster Management Agency. **Methods:** The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The informants in this study were employees of the Regional Disaster Management Agency of Majene Regency which deals with disaster problems and the people of Majene Regency, especially those who live in areas prone to earthquakes. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the Effectiveness of the Regional Disaster Management Agency of Majene Regency can be classified as effective because it can be seen from the results of the data obtained regarding the Regional Disaster Management Agency of Majene Regency which shows that the Agency has carried out earthquake disaster mitigation every year and fulfilled indicators used by the author as research. Barriers that come from outside and inside can also be overcome with the efforts made. **Conclusion:** The effectiveness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Earthquake Disaster Mitigation can be said to be effective. This is because the Regional Disaster Management Agency of Majene Regency has implemented mitigation every year with good results and meets the indicators used by researchers. Factors that hinder the effectiveness of the Regional Disaster Management Agency for Majene Regency in general are budget constraints that have an impact on the development of earthquake mitigation programs, lack of experienced human resources and the low level of public awareness to implement earthquake disaster risk reduction.

Keywords: Effective, Regional Disaster Management Agency, Mitigation, Earthquake.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami masyarakat terkait Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene serta mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene tersebut. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang ada dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene yang menanggulangi masalah kebencanaan dan masyarakat Kabupaten Majene khususnya yang bertempat tinggal di daerah yang rawan bencana gempa bumi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene dapat digolongkan efektif karena hal tersebut dapat dilihat dari hasil data yang diperoleh mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene menunjukkan bahwa Badan tersebut telah menjalankan mitigasi bencana gempa bumi setiap tahunnya serta memenuhi indikator yang digunakan penulis sebagai penelitian. Hambatan yang berasal dari luar maupun dalam juga sudah dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan. **Kesimpulan:** Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene telah melaksanakan mitigasi setiap tahunnya dengan hasil yang baik serta memenuhi indikator yang digunakan peneliti. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene secara umum adalah keterbatasan anggaran yang berdampak pada pengembangan program mitigasi gempa bumi, kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menerapkan pengurangan risiko bencana gempa bumi.

Kata kunci: Efektif, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Mitigasi, Gempa Bumi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gempa bumi menjadi bencana alam terbesar bagi manusia, disamping bencana alam lainnya seperti tsunami dan letusan gunung berapi. Oleh karena itu, Gempa bumi merupakan bencana yang perlu diwaspadai. Sebuah surat kabar online, *Vibizdaily* – internasional pada 2010 menyatakan bahwa gempa bumi merupakan pemicu bencana besar dan mematikan dalam satu dekade terakhir serta masih menjadi ancaman utama bagi jutaan orang, terutama bagi yang bermukim di kota besar. Sebuah tulisan yang di dukung PBB menyatakan bahwa hampir 60 persen dari kurang lebih 780 ribu orang yang tewas akibat bencana alam antara tahun 2000 hingga 2009, tewas akibat gempa bumi. Katalog *United States Geological Survey* (USGS) menyatakan 4 (empat) bencana gempa bumi besar di Indonesia yaitu gempa bumi Banda (8,5 Mw) tahun 1983, gempa bumi Sumatera-Andaman Islands (9,1 Mw) tahun 2004, gempa bumi Nias (8,6 Mw) tahun 2005 dan gempa bumi Pantai Barat Sumatera (8,6 Mw) tahun 2012. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat intensitas kegempaan tinggi. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak terhindarkan dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh gempa bumi. Selain menimbulkan jatuhnya korban jiwa, dampak negatif akibat gempa bumi juga yaitu adanya kerusakan infrastruktur fisik dimana kerusakan bangunan menjadi yang paling dominan. Angka kerusakan bangunan akibat gempa bumi besar yang pernah tercatat mencapai 35 persen dari keseluruhan bangunan yang ada, hal tersebut terjadi di Kota Banda Aceh tahun 2004 (E. Irwansyah E. Winarko, 2012). Mengetahui fakta diatas, dibutuhkan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan agar tidak menghambat laju pembangunan.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana dalam situasi adanya potensi bencana yaitu meliputi: Kesiapsiagaan, Peringatan dini, dan Mitigasi bencana. Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan semakin membaik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab pada usaha penanggulangan bencana yang secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku organisasi pemerintah daerah yang bergerak di bidang penanggulangan bencana harus mampu merancang penanggulangan bencana dengan melakukan perubahan paradigma. Jika sebelumnya menerapkan pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat maka perlu berubah menuju paradigma baru yakni berfokus pada pengurangan risiko. Pengurangan risiko tersebutlah yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 “Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif gempa bumi dapat dilakukan melalui mitigasi pra bencana. Pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya. Berlandaskan kondisi geografisnya, daerah Kabupaten Majene termasuk dalam zona adanya potensi bencana, baik bencana alam, non alam maupun manusia yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman, kerusakan hingga kerugian pada manusia dan lingkungan yang nantinya akan berdampak pada pembangunan, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2020, terdapat 237 kabupaten/kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Majene menjadi salah satu kabupaten yang termasuk dalam 3 (tiga) kabupaten/kota dengan indeks risiko paling tinggi. Dilihat dari potensi luas bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Majene pada tiap-tiap kecamatan, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas bahaya gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan
di Kabupaten Majene Tahun 2018

No.	Kecamatan	Bahaya (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Luas Total	Kelas
1	Banggae	-	-	2.515,00	2.515,00	Tinggi
2	Banggae Timur	-	1.583,70	1.420,30	3.004,00	Tinggi
3	Malunda	11.172,14	6.292,18	1.300,67	18.765,00	Tinggi
4	Pamboang	-	5.083,02	1.935,98	7.019,00	Tinggi
5	Sendana	-	7.879,40	344,60	8.224,00	Tinggi
6	Tammerodo Sendana	-	5.540,00	-	5.540,00	Sedang
7	Tube Sendana	-	4.117,00	-	4.117,00	Sedang
8	Ulumanda	22.878,14	22.721,86	-	45.600,00	Sedang
Kab. Majene		34.050,28	53.217,16	7.516,56	94.784,00	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Majene

Tabel diatas menunjukkan potensi luas bahaya gempa bumi per kecamatan yang terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luas cakupan wilayah yang mempunyai kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Kabupaten Majene ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kecamatan. Kelas bahaya gempa bumi Kabupaten Majene ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan Kabupaten Majene terdampak gempa bumi. Total luas bahaya gempa bumi di Kabupaten Majene secara keseluruhan adalah 94.784,00 Ha, dan berada pada kelas tinggi. Secara terperinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 34.050,28 Ha, kelas sedang seluas 53.217,16 Ha, sedangkan luas potensi bahaya gempa bumi pada kelas tinggi adalah 7.516,56 Ha.

Tabel 1. 2

Jenis Bencana Alam Kabupaten Majene Tahun 2015-2019

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Penduduk Terpapar	Lahan Terpapar	Kerugian
1.	Banjir	Tinggi	39.859	-	53.301.90
2.	Banjir Bandang	Tinggi	612	1,27	4.034.83
3.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	158.111	-	950.533.27
4.	Gempa bumi	Tinggi	65.678	-	236.344,15
5.	Kebakaran Hutan dan lahan	Tinggi	169.072	-	1.020.373.58
6.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	-	6.530.05	-
7.	Kekeringan	Tinggi	169.072	1.078.82	877,53
8.	Tanah Longsor	Tinggi	33.882	12.933.96	423.020,30
9.	Tsunami	Tinggi	80.744	-	216.633.93

Sumber : Dokumen KRB Majene

Tabel diatas menunjukkan tingkat risiko, penduduk dan lahan terpapar hingga jumlah kerugian dari masing-masing bencana alam di Kabupaten Majene. bahwa dari Tahun 2015 hingga tahun 2019 bencana gempa bumi di Kabupaten Majene memiliki kerugian ekonomi sebesar 236.344,15 juta. Angka ini terlihat jauh berbeda dengan kerugian yang terjadi pada gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Majene Bulan Januari Tahun 2021 lalu. Bencana gempa bumi yang baru terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Majene sebanyak dua kali yakni pada tanggal 14 Januari 2021 dengan magnitude 5,9 SR dan terjadi lagi pada tanggal 15 Januari 2021 dengan magnitude 6,2 SR. Gempa bumi tersebut disebabkan *Mamuju Thrust* atau sesar naik mamuju yang pada tahun 1969 juga menjadi penyebab gempa bumi di Kabupaten Majene dengan kekuatan 6,9 SR hingga menyebabkan 64 meninggal dunia, 97 luka-luka, 1.287 bangunan rusak. Dapat dikatakan bahwa gempa bumi Kabupaten Majene tahun 2021 merupakan perulangan gempa bumi tahun 1969 karena dibangkitkan oleh sumber yang sama. Bencana gempa bumi yang terjadi Kabupaten Majene Tahun 2021 berdampak pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Malunda, Ulumanda, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, dan Sendana. Bencana ini mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia, 3 (tiga) orang belum ditemukan, 1.474 orang luka-luka, mengungsi 25.416 orang serta mengakibatkan kerusakan pada rumah, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan sedang maupun ringan. Akibat dan dampak dari gempa bumi tersebut didapatkan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp770.698.401.700,- dengan rincian sektor perumahan Rp556.613.639.300,- sektor infrastruktur Rp50.584.155.600,- sektor ekonomi Rp12.566.378.000,- sektor social Rp144.922.168.400,- dan lintas sektor Rp6.012.060.400,-.

Kejadian gempa bumi tersebut tentu menjadi banyak perhatian dari seluruh unsur masyarakat tak terkecuali pemerintah dan para ahli kebencanaan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Barat, Hatta Kainang yang menjabat sekaligus sebagai Ketua Panitia Khusus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial Pascagempa DPRD Sulawesi Barat menyatakan bahwa sepanjang 16 tahun Sulawesi Barat terbentuk, pemerintah kurang serius mengoptimalkan ketatabencanaan dan menjalankan mitigasi. Padahal, Sulawesi Barat berulang kali dirusak gempa, bahkan tsunami. Pimpinan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam hal kebencanaan kurang mampu mengoptimalkan, sehingga ketika terjadi gempa, pemerintah *shock* dan hal ini merupakan serpihan dari mitigasi yang tidak tuntas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Fitria Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dengan judul penelitian Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta belum memadainya ketersediaan sistem peringatan dini bencana banjir sehingga tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng belum berjalan dengan maksimal. Penelitian kedua, oleh Adi Sucipto dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Bentuk pemberdayaan masyarakat oleh BPBD dalam mitigasi bencana berupa penyadaran, penguatan, dan pendayaan, faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan tersebut, serta hasil yang dicapai dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Penelitian ketiga oleh Adelina Manullang, dan Maesaroh dari Universitas Diponegoro pada tahun 2019 dengan judul penelitian Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang belum efektif. Indikator penelitian yang digunakan membuktikan adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana penanggulangan bencana, juga terbatasnya sumber daya manusia baik dari jumlah kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki, dan kapasitas kelembagaan belum memadai dikarenakan kepala Pelaksana BPBD masih dijabat oleh Eselon III, sehingga menyebabkan terjadinya hambatan dalam pengkoordinasian dengan perangkat daerah terkait kegiatan yang berlangsung. Berdasarkan standar efektivitas yang dijadikan alat ukur menunjukkan belum tercapai dan terdapat faktor penghambat dalam penanggulangan bencana.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas keefektifan penanggulangan dengan penekanan penelitian pada tahap pra bencana banjir dan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Perbedaan dengan penelitian kedua yang akan dilakukan yakni dalam penelitian ini melihat bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BPBD sebagai wujud mitigasi bencana secara umum. Perbedaan dengan penelitian

ketiga yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas efektivitas BPBD berdasarkan penanggulangan bencana secara keseluruhan.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene serta mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene tersebut.

II. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang ada dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene yang menanggulangi masalah kebencanaan dan masyarakat Kabupaten Majene khususnya yang bertempat tinggal di daerah yang rawan bencana gempa bumi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendeskripsikan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene menggunakan teori Efektivitas Manurung dkk (2018:27) yaitu kesesuaian perencanaan dengan tujuan, pelaksanaan tanggung jawab, prestasi tugas, hasil yang dicapai dan kepuasan pribadi.

3.1 Kesesuaian Perencanaan dengan tujuan

Efektivitas organisasi mengacu kepada tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk mencapai sebuah tujuannya maka organisasi memiliki langkah atau cara bagaimana untuk mewujudkannya. Alasan dibutuhkannya perencanaan merupakan sebagai pandangan bagi organisasi tentang tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk tercapainya tujuan bersama. Perencanaan merupakan salah satu syarat utama yang dapat menentukan suatu organisasi sudah efektif atau belum. Proses atau rencana yang dilakukan juga harus selaras dengan tujuan dari organisasi agar tidak menyimpang dari apa yang ingin dicapai. Apabila Perencanaan dengan tujuan sudah selaras dan sejalan maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif secara umum. dalam mencapai tujuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Kabupaten Majene yaitu Unggul, mandiri, dan religius. Selain itu, mitigasi bencana gempa bumi yang menjadi fokus dalam penelitian ini juga sudah sesuai dengan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat agar dapat menciptakan Kabupaten Majene yang unggul dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi dan menanggulangi bencana yang dapat terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut memiliki kendala seperti pendanaan yang kurang terkait kebencanaan, hal ini berdampak pada program pendampingan kebencanaan kepada masyarakat termasuk bencana gempa bumi dan tsunami.

3.2 Pengorganisasian Tanggung Jawab Pekerjaan

Tanggung jawab merupakan perilaku terhadap apa yang dikerjakan, tanggung jawab berkaitan dengan hak, tugas, dan kewajiban yang harus diselesaikan sesuai aturan norma yang berlaku. Dalam suatu organisasi seluruh komponen yang ada didalamnya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dilaksanakan. Apabila komponen organisasi tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat mencapai tujuan dari organisasi maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat terkait penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Majene. Untuk mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene maka dibutuhkannya pengorganisasian tanggung jawab pekerjaan, mulai dari pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab organisasi hingga mengarahkan interaksi pekerjaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut ditemukan hambatan yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, badan penanggulangan bencana daerah kabupaten majene masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan masih berusaha memenuhi standar pelayanan minimal yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. Terkait sarana dan prasarana, BPBD Kabupaten Majene juga masih kurang memadai dan perlu diperbarui kembali sarana dan prasarana kantor. Namun sampai saat ini mengingat anggaran yang belum ada, BPBD berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum juga pemerintah pusat apabila membutuhkan bantuan terkait sarana prasarana.

3.3 Prestasi Tugas

Prestasi Tugas (*Task Performance*) merupakan hasil kerja (*output*) yang telah dilakukan oleh komponen organisasi dalam mencapai tujuannya. Kinerja yang dilakukan komponen organisasi harus sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila hasil kerja (*output*) atau produk yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi maka dapat dikatakan efektif. Tugas yang diberikan kepada komponen organisasi harus sesuai juga dengan standar kemampuan dari komponen tersebut agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan efektif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene memiliki anggota yang berpengalaman di lapangan dalam hal mitigasi bencana gempa bumi, namun memang belum semua personilnya. Sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Majene memiliki kemampuan dan kinerja yang baik dalam melakukan mitigasi bencana gempa bumi. Namun selama ini masih banyak kendala yang dialami seperti Pendidikan dan peatihan bagi staff serta anggaran yang kurang. Ini seharusnya bisa berpengaruh terhadap kinerja personel BPBD di lapangan, akan tetapi selama peneliti melakukan observasi personel BPBD tetap bersemangat dan antusias dalam melakukan mitigasi bencana gempa bumi pasca bencana gempa bumi terakhir, seperti pemasangan kembali rambu jalur evakuasi dan titik kumpul serta perbaikan rumah warga terdampak bencana gempa bumi.

3.4 Hasil Produk yang Dicapai

Hasil produk yang dicapai merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keefektifan dari sebuah organisasi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene. Hasil yang dicapai harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Ketika sebuah organisasi sudah mencapai tujuannya maka dapat dikatakan organisasi tersebut sudah efektif. Dalam hal ini peneliti melihat berdasarkan realisasi program kebencanaan terkait mitigasi bencana gempa bumi yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene. Realisasi program tersebut dapat dilihat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene yang terangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
dalam 3 Tahun Terakhir

INDIKATOR KINERJA SASARAN		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap darurat	Jumlah laporan monitoring
SATUAN		Peserta	Kecamatan
TAHUN 2017	Target	345 org	4 lap. 8 kec
	Realisasi	200 org	4 lap. 8 kec
	Capaian	57,97%	100%
TAHUN 2018	Target	60 org	4 lap. 8 kec
	Realisasi	40 org	4 lap. 7 kec
	Capaian	66,66%	87,5%
TAHUN 2019	Target	300 org	4 lap. 8 kec
	Realisasi	350 org	4 lap. 8 kec
	Capaian	116,67%	100%

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan data yang diolah oleh peneliti, terdapat dua indikator terkait mitigasi bencana gempa bumi. Pertama, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap darurat yang direalisasikan dalam kegiatan pelatihan simulasi dan evakuasi bencana gempa bumi/tsunami berbasis masyarakat. Indikator tersebut bagian dari sasaran strategis peningkatan kualitas pengetahuan dan profesionalisme relawan mengenai kebencanaan. Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, kegiatan tersebut terus memiliki capaian yang semakin meningkat bahkan pada tahun 2019 angka realisasi kegiatan melampaui dari angka yang telah ditargetkan.

3.5 Kepuasan Pribadi

Kepuasan Pribadi (*Satisficing Personal*) merupakan tingkat kepuasan individu dari orang yang merasakan hasil pelayanan yang diberikan oleh organisasi. Kepuasan yang dimaksud dalam indikator efektivitas pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene dalam menanggulangi bencana yang terjadi. Ketika tingkat kepuasan seluruh komponen yang merasakan pelayanan sudah baik maka dapat dikatakan organisasi tersebut efektif. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene memerlukan tanggapan atau umpan balik yang diberikan masyarakat sebagai bentuk masukan yang digunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja dan pencapaian tujuan. masyarakat merespon baik terhadap program mitigasi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, namun kesadaran masyarakat masih rendah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal ini membuat program pendampingan ke masyarakat perlu dilakukan beberapa kali serta dilakukan inovasi baru.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memiliki Fokus Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene. Penelitian pertama oleh Fitria Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta belum memadainya ketersediaan sistem peringatan dini bencana banjir sehingga tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng belum berjalan dengan maksimal. Penelitian kedua oleh Adi Sucipto dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 Bentuk pemberdayaan masyarakat oleh BPBD dalam mitigasi bencana berupa penyadaran, penguatan, dan pendayaan, faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan tersebut, serta hasil yang dicapai dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Penelitian ketiga oleh Adelina Manullang, dan Maesaroh dari Universitas Diponegoro pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang belum efektif. Indikator penelitian yang digunakan membuktikan adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana penanggulangan bencana, juga terbatasnya sumber daya manusia baik dari jumlah kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki, dan kapasitas kelembagaan belum memadai dikarenakan kepala Pelaksana BPBD masih dijabat oleh Eselon III, sehingga menyebabkan terjadinya hambatan dalam pengkoordinasian dengan perangkat daerah terkait kegiatan yang berlangsung. Berdasarkan standar efektivitas yang dijadikan alat ukur menunjukkan belum tercapai dan terdapat faktor penghambat dalam penanggulangan bencana.

IV. KESIMPULAN

Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene telah melaksanakan mitigasi setiap tahunnya dengan hasil yang baik serta memenuhi indikator yang digunakan peneliti. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene secara umum adalah keterbatasan anggaran yang berdampak pada pengembangan program mitigasi gempa bumi, kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menerapkan pengurangan risiko bencana gempa bumi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan hasil penelitian yang dilakukan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten majene dan serta seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten majene yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Wahyuni, Fitria. 2020. *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.*

Sucipto, Adi. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung*

Manullang, Adelina. Maesaroh. 2019. *Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Semarang*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.